

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- . *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- . *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- . *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Chemerinsky, Erwin. *Constitutional Law: Principles and Policies (6th ed.)*. New York: Wolters Kluwer, 2019.
- Foekh, Daniel Yusmic P. *Perpu dalam Teori dan Praktik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ghaffar, Janedjri M.. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Ghoffar, Abdul. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hamidi, Jazim. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2010.

- H.F. Abraham Amos. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, sampai Reformasi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hsb, Ali Marwan. *Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Putusannya*. Medan: Enam Media, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- _____. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- _____. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 2; Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- K.C. Wheare. *Modern Constituion*. London: Oxford University Press, 1966.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State translated by Anders Wedeberg*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Law, David, dan Jason Powers. "State of Emergency." *Backgrounder Security Sector Governance and Reform*, Oktober 2005.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media - PSH UII, 1999.
- M.D., Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- M.D., Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia (Cetakan Kedelapan)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional; Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sumardjono, Maria S.W.. *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Sutiyoso, Bambang . *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

- Yamin, Muhammad. *Risalah sidang pertama dan kedua: Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama*. Jakarta: Siguntang, 1971.
- Safa'at, Muchamad Ali. "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK," t.t.
- Siahaan, Muruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan : Eksekutif di bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Taufik, Giri Ahmad, dan Rahayu Prasetyaningsih, ed. *Regulasi yang Baik: teori, Praktik, dan Evaluasi (Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-Undangan Indonesia dari Murid dan Kolega Prof. Dr. Bagir Manan, SH. M.C.L.* Bandung: UNPAD Press, 2021.
- Tim Penyusun. *Naskah Komperhensif Peubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku 1 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- . *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku 4 Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- . *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Artikel dan Jurnal

- Ahmadi. "Legalitas Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Terhadap PERPPU Nomor 1 Tahun 2014)." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 12, no. 2 (23 Januari 2018).

- Akmam, Sidharta. "Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik." *Jurnal Hubungan Internasional* 10, no. 2 (9 Januari 2018).
- Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018).
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (20 Mei 2016).
- Cappelletti, Mauro. "Judicial Review in Comparative Perspective." *California Law Review* 58, no. 5 (Oktober 1970).
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengujian PERPU Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara." *Jurnal Yudisial* 5, no. 1 (2012).
- Harijanti, Susi Dwi. "Perppu Sebagai Extra Ordinary Rules: Makna dan Limitasi." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2, no. 01 (2017).
- Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal legislasi Indonesia* 14, no. 1 (Maret 2017).
- Huda, Ni'matul. "Problematisasi Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013).
- Indrayana, Denny, dan Zainal Arifin Mochtar. "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (Oktober 2007).
- J. Ferejohn, dan P. Pasquino. "The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers." *International Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (1 April 2004).
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (5 Desember 2017).
- Julianthy, Evlyn Martha. "Limitasi Materi Muatan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020).

- Kurniawan, M. Beni. "Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (19 November 2018).
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (11 Juli 2019).
- Nalle, Victor Imanuel W. "Kritik Terhadap PERPU Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan." *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021).
- Pratiwi, Dian Kus, Muhammad Addi Fauzani, dan Retno Widiastuti, "Konstruksi Kewenangan Presiden untuk Menyatakan Keadaan Bahaya/Darurat dalam Menghadapi Corona Virus Disease-2019. (t.t.)
- Putra, Antoni. "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (Desember 2021).
- Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013).
- Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian 'Ihwal Kegentingan Yang Memaksa' dalam Penerbitan Perppu." *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 01 (2010): 13.
- Sucahyono. "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (15 Desember 2019).
- Sumodiningrat, Aprilian. "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (1 Juni 2023).
- Tomkins, Adam. "The Role of The Courts in The Political Constitution." *University of Toronto Law Journal* 60, no. 1 (Januari 2010).
- Winarno, Sugeng. "Demokrasi, Demonstrasi, dan Demo Crazy." *Malang Post*. 25 September 2019.
- Zuraida, Ida. "Batasan Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) di Bidang Perpajakan." *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018).

Karya Tulis Ilmiah

Ayuni, Qurrita. “Konsep Hukum Tata Negara Darurat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Kajian Terhadap Pengaturan dan Penerapan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia dalam Kurun Waktu 1945 - 2022.” Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Iskandar, Alex Ady, Konstitusionalitas Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Membatalkan Undang-Undang (Analisis Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota), Tesis, (Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017)

Maulidi, Mohammad Agus. “Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Risky, Mohammad. “Problematisa Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat.” Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Constitution of the Federative Republic of Brasil 1988.

Constitution of The Republic of Korea Amended by Constitution No. 10, October 29, 1987.

Constitution of the Argentine Nation 1994.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Risalah Sidang DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Risalah Rapat Komisi II Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” 15 Januari 2015.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Komisi II Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” 16 Januari 2015.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Resmi Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 dan PERPU No. 2 Tahun 2014”, 20 Januari 2015.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Risalah Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang”, 4 Oktober 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Risalah Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang” 18 Oktober 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Risalah Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang” 20 Oktober 2017.

Makalah

Muchamad Ali Safa’at. “Perppu Plt Pimpinan KPK; Adakah Kegentingan Memaksa?,” t.t. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PERPPU-PLT-KPK.pdf>.

Internet

Andi Saputra. “Ahli: Hukuman Kebiri Lebih Tepat Diatur di UU, Bukan di Perppu,” 22 Oktober 2015. <https://news.detik.com/berita/d-3050293/ahli-hukuman-kebiri-lebih-tepat-diatur-di-uu-bukan-di-perppu>.

ANTARA News Jawa Barat. “Koalisi Masyarakat Gelar Penolakan RUU Pilkada.”

1 Januari 2023. <https://jabar.antaranews.com/amp/berita/50284/koalisi-masyarakat-gelar-penolakan-ruu-pilkada>.

Asril, Sabrina. “Langkah Penyelamatan MK, Pemerintah Siapkan Perpu,” 5 Oktober 2013.

<https://tekno.kompas.com/read/2013/10/05/1552262/langkah.penyelamatan.mk.pemerintah.siapkan.perpu>.

Berita Satu, “Menko Polhukam Wiranto Umumkan Perppu Pembubaran Ormas Radikal”. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=TH3AnwpFn8s>

CNN Indonesia. “KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022,” 28 Januari 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.

———. “Minim Urgensi Aturan Nomor Urut Parpol Pemilu 2024 di Perppu Jokowi,” 14 Desember 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221214094739-32-887188/minim-urgensi-aturan-nomor-urut-parpol-pemilu-2024-di-perppu-jokowi>.

———. “Perppu Cipta Kerja Resmi Disahkan Jadi Undang-undang,” 21 Maret 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321104533-32-927642/perppu-cipta-kerja-resmi-disahkan-jadi-undang-undang>.

Detik News. “Ini Tujuan Dikeluarkannya Perppu KPK,” 23 Februari 2015. <https://news.detik.com/berita/d-2840018/ini-tujuan-dikeluarkannya-perppu-kpk>.

———. “Survei LSI Denny JA: Mayoritas Masyarakat Tolak Pilkada Lewat DPRD,” 9 September 2014. <https://news.detik.com/berita/d-2685336/survei-lsi-denny-ja-mayoritas-masyarakat-tolak-pilkada-lewat-dprd>.

Erdianto, Kristian. “HTI: Kami Tidak Pernah Diberi Surat Peringatan oleh Pemerintah,” 8 Mei 2017.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/18444851/hti.kami.tidak.per.nah.diberikan.surat.peringatan.oleh.pemerintah.>

Elnizar, Norman Edwin, “Berbincang Seputar Seluk Beluk Perppu dengan Daniel Yusmic,” 5 Juli 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/berbincang-seputar-seluk-beluk-perppu-dengan-daniel-yusmic-lt595cb74e1f3fe/>.

Fenoria, Feri, “Pakar UNAIR Tegaskan Perppu Ciptaker Tidak Ada Kaitan dengan Konflik Rusia-Ukraina,” 11 Januari 2023, <https://unair.ac.id/pakar-unair-tegaskan-perppu-ciptaker-tidak-ada-kaitan-dengan-konflik-rusia-ukraina/>.

Indonesia.go.id. “Indonesia.go.id - Momentum Pemulihan di 2023 Masih Kuat,” 17 Februari 2023. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6879/momentum-pemulihan-di-2023-masih-kuat?lang=1>.

JSLG Official. “Eps.27 ‘Syarah Konstitusi’ Ngaji Pasal 22 & Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945,” 29 Oktober 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=PKQheRPOWsI>.

Kompas. “Ini Isi Perppu Nomor 1 tahun 2015 tentang KPK,” 23 Februari 2015. <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/00235331/Ini.Isi.Perppu.No.mor.1.tahun.2015.tentang.KPK.>

———. “Kantor Disdukcapil Kulon Progo Tutup Setelah Seorang Pegawai Positif Covid-19 Halaman all - Kompas.com,” 16 November 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/11/16/11344881/kantor-disdukcapil-kulon-progo-tutup-setelah-seorang-pegawai-positif-covid?page=all>.

———. “Rakyat Tak Setuju Pilkada Langsung Dihapus,” 15 September 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/17095921/Rakyat.Tak.Setuju.Pilkada.Langsung.Dihapus.>

———. “Megawati Usul Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Perlu Diubah,” 17 September 2022. <https://www.kompas.tv/article/329230/megawati-usul-nomor-urut-parpol-peserta-pemilu-2024-tak-perlu-diubah.>

- M.D, Mahfud. “UU Mati, Perppu Tak Hidup – Jalan Pikiran Prof. Mahfudz MD,” 16 Juli 2015. <https://profmahfud.wordpress.com/2015/07/16/uu-mati-perppu-tak-hidup/>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Ahli: Perpu Pilkada Tidak Memenuhi Syarat Formil,” 8 Januari 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10482>.
- MD., Moh. Mahfud. “Tak Ada Perppu yang Tak Kontroversial - Kompas.id,” 27 April 2020. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/04/27/tak-ada-perppu-yang-tak-kontroversial/>.
- Rizki, Mochammad Januar. “Persetujuan Perppu Cipta Kerja di DPR Tuai Protes Keras,” 17 Februari 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/persetujuan-perppu-cipta-kerja-di-dpr-tuai-protes-keras-lt63ef6c8a7417b/>.
- Nasional Tempo.co. “Eks Ketua MK: Perpu Ormas Tak Penuhi Syarat Dikeluarkannya Perpu.” Diakses 22 Januari 2023. <https://nasional.tempo.co/read/892326/eks-ketua-mk-perpu-ormas-tak-penuhi-syarat-dikeluarkannya-perpu>.
- . “Kantor Bupati Lebak Ditutup Setelah 25 Pegawai Positif Covid-19,” 23 Februari 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1435501/kantor-bupati-lebak-ditutup-setelah-25-pegawai-positif-covid-19>.
- . “Kemendagri Targetkan Perpu Pemilu untuk Akomodir DOB Papua Selesai Bulan Ini - Nasional Tempo.co,” 2 September 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1629536/kemendagri-targetkan-perpu-pemilu-untuk-akomodir-dob-papua-selesai-bulan-ini>.
- Putra, Putu Merta Surya. “KPAI: Perppu Kebiri Bisa Jadi Solusi Kejahatan Seksual Anak,” 25 Oktober 2015. <https://www.liputan6.com/news/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksual-anak>.
- Riswandy, Arie. “Koalisi LSM dan Mahasiswa Demo Tolak Pilkada Lewat DPRD,” 24 September 2014.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20140924131136-32->

[4203/koalisi-lsm-dan-mahasiswa-demo-tolak-pilkada-lewat-dprd.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20140924131136-32-4203/koalisi-lsm-dan-mahasiswa-demo-tolak-pilkada-lewat-dprd)

Ulya, Fika Nurul. “Sudah 12 Negara yang Kini Alami Resesi.” Diakses 7 Maret 2023. <https://money.kompas.com/read/2020/08/17/104459826/sudah-12-negara-yang-kini-alami-resesi?page=all>.

Utomo, Ardi Priyatno. “WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global,” 12 Maret 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all>.

Yuliani, Andi. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa Ke Masa,” t.t. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180.

Zihan Syahayani. “Problematika Perppu Kebiri | The Indonesian Institute,” 6 Juni 2016. <https://www.theindonesianinstitute.com/problematika-perppu-kebiri/>.